



MENYIAPKAN PENDIDIKAN KEJURUAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL YANG BERDAYA SAING

Muhammad Nurtanto¹, Sulaeman Deni Ramdani¹

¹Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang 42117, Indonesia
E-mail: mnurtanto23@untirta.ac.id

Diterima: 02 Juni 2016. Disetujui: 02 Oktober 2016. Dipublikasikan: 07 Oktober 2016

Abstrak

Penyelenggaraan pendidikan kejuruan selayaknya memperhatikan kearifan lokal masing-masing daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang tepat dan solutif untuk menjawab tantangan persaingan global yang saat ini menjadi pusat perhatian, yaitu pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Adanya penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan potensi daerah akan memicu pertumbuhan perekonomian masyarakat lokal, sehingga setiap daerah mampu bersaing sesuai dengan karakteristik dan keunikan daerah masing-masing. Beberapa hal penting yang selayaknya menjadi pertimbangan dalam pengembangan pendidikan kejuruan di setiap daerah yaitu karakteristik daerah, regulasi pemerintah daerah, kesadaran masyarakat, kesiapan sekolah, dan karakteristik industri setempat. Kelima aspek tersebut sangat penting untuk dijadikan dasar pengembangan pendidikan kejuruan agar menghasilkan penyelenggaraan pendidikan kejuruan berbasis kearifan lokal yang mampu mencetak lulusan yang kompeten dan kompetitif.

© 2016 Jurusan Pendidikan Teknik Elektro, FKIP UNTIRTA

Kata kunci: Daya Saing, Kearifan Lokal, Pendidikan Kejuruan, Vokasional.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan kejuruan atau sering disebut Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) saat ini menjadi pusat perhatian. Rasio sekolah menengah kejuruan dan Sekolah Menengah Umum (SMU) yang tadinya 30:70 berubah menjadi 70:30 merupakan tantangan tersendiri bagi para pengembang pendidikan.

Peningkatan jumlah SMK yang tersebar di penjuru Indonesia semakin tinggi dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini merupakan dampak dari pembukaan kompetensi keahlian atau pendirian SMK baru untuk memenuhi rasio yang telah direncanakan tersebut.

Pembukaan kompetensi keahlian baru di SMK meningkat dengan signifikan. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah kom-

petensi keahlian di SMK di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir. Pembukaan SMK dilakukan oleh instansi negeri ataupun swasta. Hal ini dilakukan untuk memenuhi rasio jumlah SMK dan SMU yang tersebar di Indonesia. Pengembangan tersebut selayaknya dilakukan dengan pertimbangan dan analisis yang disesuaikan dengan kearifan lokal dari setiap daerah yang ada. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat penting agar pengembangan SMK di berbagai tempat dapat dilaksanakan dengan sesuai dan menjawab tantangan dan potensi pada masing-masing daerah tersebut.

Pengembangan SMK yang berdaya saing selayaknya menjadi acuan bagi para pengembangan pendidikan kejuruan. Pembukaan SMK selayaknya berlandaskan pada karakteristik dan kebutuhan yang ada pada masing-masing daerah. Kenyataan yang terjadi saat ini mengenai pembukaan SMK lebih terkesan untuk memenuhi tuntutan rasio yang telah direncanakan dan melenceng dari substansi yang seharusnya. Hal ini menjadi pembahasan penting karena berkaitan dengan kompetensi angkatan kerja yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan kejuruan yang dikembangkan pada setiap daerah.

Pendidikan yang bermutu dapat dipandang dari dua sisi, yaitu kualitas dan kuantitas. Secara kualitas pendidikan sekolah kejuruan mengacu pada penjaminan mutu 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari: (a) standar isi, (b) standar proses, (c) standar kompetensi lulusan, (d) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (e) standar sarpras, (f) standar pengelolaan, (g) standar pembiayaan, dan (h) standar penilaian pendidikan. Faktanya capaian SNP berdasarkan nilai komponen tersebut tahun 2009-2014 pada pendidikan sekolah kejuruan menunjukkan: (1) standar isi sebesar 72, (2) standar proses sebesar 71, (3)

kompetensi lulusan sebesar 66, (4) pendidikan dan tenaga pendidikan sebesar 67, (5) sarana dan prasarana sebesar 67, (6) pengelolaan sebesar 64, (7) pembiayaan sebesar 76, dan (8) penilaian sebesar 76 (Jarimollah, 2015). Secara kuantitas (jumlah) sekolah menengah kejuruan telah cukup mendukung perkembangan industri, sebab dewasa ini telah ada sekitar 2.092 SMK Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia, yang terbagi dalam 160 jenis program studi. Tiap tahunnya sekitar 180.000 orang lulus dari sekolah kejuruan, (Ratnata, 2012).

Data di atas menunjukkan bahwa secara kualitas dan kuantitas, pengembangan SMK masih memerlukan suatu upaya strategis untuk mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan SMK. Mengingat hasil pendidikan secara kualitas dan kuantitas yang masih menunjukkan angka kasar, dimana dari 8 SNP masih terdapat beberapa indikator pendukung yang masih rendah dan jumlah lulusan tiap tahunnya semakin tinggi, maka diperlukan penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, berdaya saing, *adaptable*, dan kompetitif. Penyelenggaraan sekolah kejuruan ditinjau dari 8 SNP belum terpenuhi dengan baik. Sebaran pemenuhan peningkatan kualitas dan kuantitas yang belum merata menjadi permasalahan bagi SMK yang baru berdiri atau jurusan yang baru dibuka. Dengan meningkatnya lulusan pendidikan kejuruan setiap tahunnya yang tidak diimbangi dengan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri, hal ini berdampak pada rendahnya keterserapan lulusan SMK dan meningkatnya pengangguran terdidik secara nasional. Hal ini menjadi permasalahan klasik yang terus bergulir setiap tahunnya. Oleh karena itu, selayaknya pengembang dan pelaksana pendidikan kejuruan mempersiapkan lulusan SMK yang terampil, kompetitif,

berdaya saing, dan cerdas. Hal ini menjadi penting karena lulusan SMK sebaiknya tidak hanya terampil pada kompetensi motorik semata, tetapi memiliki intelektual yang baik untuk melanjutkan studi ke pendidikan yang lebih tinggi ataupun memiliki sikap dewasa dan mandiri untuk menjadi *young entrepreneurs* yang sukses.

Tujuan pelaksanaan pendidikan kejuruan atau vokasional selayaknya multi-fungsi dan saling berkaitan. Fungsi utama pendidikan kejuruan yaitu membekali kompetensi siswa untuk memperoleh pekerjaan sesuai bidang keahliannya, sedangkan fungsi kedua pendidikan kejuruan yaitu mampu berkontribusi dalam penyesuaian diri dan perubahan terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional (Nurtanto, 2015). Selain itu, peningkatan kompetensi berwirausaha menjadi salah satu poin positif untuk mempersiapkan lulusan yang siap bersaing dan berkompetisi di dunia usaha.

Berdasarkan uraian di atas, pembukaan SMK atau jurusan baru di SMK menjadi penting untuk pemenuhan kebutuhan lulusan di dunia industri. Beberapa alasan pendirian SMK baru, kompetensi keahlian baru, atau mengubah sekolah umum menjadi sekolah kejuruan diantaranya adalah, (1) sekolah vokasional merupakan sekolah dengan *trand* tersendiri yaitu dengan slogan "SMK Bisa" yang mampu menarik perhatian orang tua yang menginginkan anaknya lulus dan langsung kerja; (2) tersedianya fasilitas dari pemerintah yang mendukung program "vokasional"; dan (3) menjadi pemenuhan kebutuhan angkatan kerja atau *employments supplying* bagi kebutuhan industri. Pengembangan SMK merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa dan optimalisasi potensi dan kearifan lokal setiap daerah.

Pengembangan SMK selayaknya memperhatikan kebutuhan daerah. Beberapa pertimbangan dalam pembukaan SMK sebagai berikut: (1) animo masyarakat terhadap sekolah vokasional yang sedang dibangun artinya berdasarkan permintaan masyarakat setempat, (2) potensi daerah yang tinggi artinya pengembangan SMK berdasarkan karakteristik industri yang ada pada daerah tersebut, dan (3) mandat pemerintah yang telah dikaji dengan berbagai hal artinya keputusan dari pemerintah setempat mengingat di sekitar daerah belum adanya sekolah vokasional.

Berdasarkan uraian di atas, pengembangan SMK di daerah selayaknya memiliki acuan pengembangan. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan pengembangan yang berprinsip pada kebutuhan dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan SMK adalah karakteristik daerah, regulasi pemerintah daerah, kesadaran masyarakat, kesiapan sekolah, dan karakteristik industri setempat. Kelima hal ini menjadi sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pengembangan pendidikan kejuruan yang berdaya saing sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah.

PEMBAHASAN

Karakteristik Daerah

Karakteristik adalah ciri-ciri khusus; mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain (Ketiga, 2002). Dengan demikian, karakteristik daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada daerah tersebut, menandai pada suatu daerah atau potensi yang diunggulkan dan membedakan dengan daerah lain. Pengem-

bangun SMK selayaknya memperhatikan karakteristik daerah setempat.

Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam dengan potensinya masing-masing. Pengembangan SMK yang memperhatikan potensi daerah akan meninjau karakteristik masyarakat, tanah, air, udara, budaya, lingkungan sekitar, dan lainnya sebelum para pengembang membuka kompetensi keahlian baru, mendirikan SMK baru, atau merubah sekolah umum menjadi sekolah kejuruan baru. Sesuai dengan pemetaan yang dilakukan oleh (Slamet, 2013) menyatakan, pengembangan potensi daerah melalui 6 (enam) koridor ekonomi yang meliputi Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Maluku.

Koridor dari masing-masing daerah berdasarkan keunggulan dan potensi strategis sebagai berikut: (1) Sumatra yaitu sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional; (2) Kalimantan yaitu pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional; (3) Sulawesi yaitu pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan serta pertambangan nikel nasional; (4) Jawa yaitu pendorong industri dan jasa nasional; (5) Bali-Nusa Tenggara yaitu pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional; (6) Papua-Maluku yaitu pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional. Hal ini berdampak pada ketepatan pemenuhan kompetensi lulusan yang diharapkan oleh daerah tersebut, sehingga diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal daerah untuk meningkatkan daya saing daerah tersebut dengan mengoptimalkan karakteristik daerah yang dimiliki.

Regulasi Pemerintah Daerah

Kebijakan berkaitan dengan kemudahan para pengembang untuk membuka kompetensi keahlian atau SMK baru. Regulasi yang berlandaskan dan berpihak pada optimalisasi kearifan lokal daerah akan memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelaksanaan pendidikan kejuruan dapat berjalan dengan lancar. Kebijakan pemerintah daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan pendidikan kejuruan. Kendala yang sering ditemui para pengembang adalah permasalahan mengenai regulasi yang rumit dan sulit untuk diselesaikan sehingga pengembangan pendidikan kejuruan terhambat oleh regulasi yang tidak mendukung pengembangan pendidikan kejuruan. Oleh karena itu, pengembangan SMK selayaknya didukung oleh regulasi pemerintah yang berpihak pada pengembangan SMK berkelanjutan sehingga setiap daerah memiliki sekolah kejuruan yang menghasilkan lulusan yang sesuai dengan karakteristik daerah tersebut.

(Maekae & others, 2013) mengungkapkan bahwa, "*....., education, in the life of a nation, is the live wire of its industries and also the foundation of moral regeneration and revival of its people*". Dimana pengembangan pendidikan dalam suatu daerah memiliki dampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat di daerah tersebut. Selain itu pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan dunia industri dan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah selayaknya mengembangkan pendidikan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut melalui kebijakan yang berpihak pada pengembangan pendidikan.

Kesadaran Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama, (*www.e-jurnal.com*). Kesadaran masyarakat mengenai pembukaan pendidikan kejuruan di daerah merupakan hal penting untuk kesuksesan pelaksanaan pendidikan kejuruan yang sesuai dan tepat sasaran. Kesadaran masyarakat yang rendah atau apatis terhadap perkembangan pendidikan di daerahnya akan berdampak pada ketidaktepatan pengembangan pendidikan kejuruan. Hal yang perlu dilakukan adalah tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan pengembangan pendidikan yang berkelanjutan yang sebaiknya ada di daerah tersebut sehingga dapat memberikan dampak lanjutan yang bermanfaat untuk masyarakat setempat.

Pendidikan harus memenuhi dan memperhatikan kebutuhan individu dan masyarakat harus menjaga agar sistem tersebut saling berkorelasi satu sama lain. Hal ini sesuai dengan pendapat (Daramola, 2006) yang menyatakan bahwa, *“Education has to fulfill both the individual's needs and those of the society and must keep pace with other sub-systems in the society, as both variables are inter-related”*. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan kejuruan selayaknya harus mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masyarakat sekitar. Pengembangan pendidikan yang berlandaskan kebutuhan masyarakat, akan menghasilkan lulusan yang dapat diterima langsung sesuai dengan karakteristik daerah.

Kesiapan Sekolah Vokasional

Pengembangan pendidikan kejuruan dilakukan dengan persiapan yang rumit. (Britto, 2012) berpendapat bahwa, *“one of the best strategies to ensure development of all individu-*

als, society and countries is through cost-effective school readiness – ready children, ready schools and ready families”. Salah satu strategi terbaik untuk memastikan pengembangan individu, masyarakat, dan negara adalah melalui beberapa kesiapan diantaranya: kesiapan pembiayaan sekolah, peserta didik, fasilitas (sarana dan prasarana) dan keluarga. Berbagai kesiapan tersebut menjadi pertimbangan penting bagi pengembangan pendidikan kejuruan, sehingga dalam implementasinya diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Persiapan pengembangan dan penyelenggaraan sekolah kejuruan di daerah sangat penting untuk keberhasilan program yang direncanakan. Kesiapan sekolah kejuruan merupakan kunci utama pelaksanaan sekolah atau kompetensi keahlian yang akan dibuka. Hal ini berkaitan dengan 8 standar nasional pendidikan yang selayaknya mampu dipenuhi untuk menghasilkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Ketika pembukaan SMK atau program studi keahlian baru akan dibuka, maka perlu memperhatikan kemampuan dan kapasitas dari daerah tersebut. Apakah ada tempat yang siap untuk melaksanakan pembukaan SMK atau kompetensi keahlian baru tersebut dan siap untuk mengembangkannya ke depan atau tidak. Kesiapan ini berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Pelaksanaan sekolah kejuruan yang cenderung membutuhkan tempat, fasilitas, dan berbagai kebutuhan pendukung lainnya perlu diperhatikan secara cermat sehingga pelaksanaan dan pengembangan sekolah kejuruan dapat dilakukan secara efisien dan optimal.

Karakteristik Industri Setempat

Pengembangan sekolah kejuruan selayaknya memperhatikan karakteristik industri yang ada pada masing-masing daerah. Hal ini

sangat penting karena berkaitan dengan karakteristik lulusan yang dihasilkan. Industri yang berkembang di setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi dan keunikan masing-masing. Oleh karena itu pengembangan pendidikan kejuruan selayaknya memperhatikan kebutuhan industri setempat, sehingga pekerja, karyawan, atau pihak yang menjalankan roda industri tersebut berasal dari masyarakat pribumi. Hal ini berdampak pada pengurangan angka pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar karena pihak industri dapat menyerap lulusan dari pendidikan kejuruan setempat karena telah memiliki karakteristik kompetensi yang sesuai yang dibutuhkan oleh industri tersebut.

(Maskan, Suparlan, Utaminingsih, & Djajanto, 2014) berpendapat "*There should be an increase between the industry and senior vocational school about communication, evaluation, link & match, regulation and quality control on doing student practice in industry*". Industri dan pendidikan kejuruan tidak lepas dari beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya: komunikasi, evaluasi, hubungan, regulasi dan *quality control*. Kerjasama pihak industri dan pendidikan kejuruan yang baik berdampak pada kualitas lulusan yang mampu diserap secara mudah. Dalam pengembangan pendidikan kejuruan, karakteristik industri perlu diperhatikan karena berkaitan dengan kerjasama di masa mendatang. Ketika pihak industri dan pihak pendidikan kejuruan dapat berkolaborasi dengan baik, pengembangan kualitas pendidikan kejuruan akan berjalan dengan pesat karena menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi industri setempat.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan kejuruan selayaknya memperhatikan beberapa aspek yaitu karakteristik daerah, regulasi pemerintah daerah, kesadaran masyarakat, kesiapan sekolah, dan karakteristik industri setempat. Kelima aspek tersebut diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan kejuruan kedepan sehingga dapat mengurangi *misconception* pengembangan dan penyelenggaraan sekolah maupun program keahlian baru yang berkembang di setiap daerah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan pendidikan yang memperhatikan kearifan lokal dan potensi daerah sehingga memiliki pendidikan kejuruan yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Britto, P. R. (2012). *School readiness: A conceptual framework*. New York: Education Section, Programme Division, United Nations Children's Fund.
- Daramola, C. O. (2006). *Education And Society: What Type Of Relationship?*. Ilorin: Education Foundations.
- Maekae, J., & others. (2013). The Role Of Education In National Development: Nigerian Experience. *European Scientific Journal*, 9(28). Diambil dari <http://search.proquest.com/openview/b0c61ca8a61cb9c3fce133551f568420/1?pq-origsite=gscholar>
- Maskan, M., Suparlan, H. B., Utaminingsih, A., & Djajanto, L. (2014). Paired Industrial Role in the Implementation of Dual System Education to Shape the Work Adaptability of Vocational High School Students in Greater Malang. Prosiding International Conference on Integration for Regional Public Management

- (ICPM). Atlantis Press. Diambil dari http://www.atlantispress.com/php/download_paper.php?id=13418
- Nurtanto, M. (2015). *Implementasi Pembelajaran Berbasis Problem-Based Learning Kompetensi Dasar Sistem Pengapian Konvensional untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif, Psikomotor, dan Afektif Siswa SMK Ma'arif Salam*. Tesis. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Poerwadarminta. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ratnata, I. W. (2012). Konsep Pemikiran dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi untuk Menghadapi Tuntutan Dunia Kerja. *Aptekindo*, 6(1). Diambil dari <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/APTEKINDO/article/view/11>
- Slamet, P. H. (2013). Pengembangan SMK Model untuk Masa Depan. *Cakrawala Pendidikan*, 5(1). Diambil dari <http://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/1256>

